



**Analisis Faktor Kepemimpinan terhadap Pelanggaran HAM
Studi Kasus: *Enforced Disappearance* di Mesir oleh Rezim Abdel Fattah al-Sisi**

Rizki Ananda

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

The enforced disappearance in Egypt occurred in 2013 after the military coup by Abdel Fattah al-Sisi against the previous President, Muhammad Mursi. Coercive actions were taken by the state to protect state security including acts of enforced disappearance. The data shows that there have been 1176 cases of enforced disappearances from 2013 to 2017. However, Egypt is a democratic country by regulation and also recognizes individual freedom in the constitution. This research aims to determine how the influence of the leadership factors of President Abdel Fattah al-Sisi on enforced disappearance cases in Egypt. For analyzing the influence of leadership factors, this research use Behavioral theory with qualitative method and descriptive research by using literature review. The result will explain how the leadership of Abdel Fattah al-Sisi is formed and can influence enforced disappearance cases in Egypt.

Keywords: enforced disappearance, behavioral theory, leadership, Abdel Fattah al-Sisi

PENDAHULUAN

Pemimpin atau presiden menjadi faktor penting dalam keberlangsungan suatu negara. Metode kebijakan ataupun aturan-aturan yang diterapkan sangat bergantung kepada negara. Salah satu pemimpin negara yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat kepada negara adalah Presiden Mesir, yaitu Presiden al-Sisi yang secara resmi menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014 menggantikan Presiden sebelumnya, yaitu Muhammad Mursi (CNN, 2018). Presiden al-Sisi bernama lengkap Abdel Fattah al-Sisi yang memiliki latar belakang sebagai seorang militer sehingga memiliki pengaruh kuat dalam urusan negara. Sebelumnya al-Sisi menjabat sebagai Menteri Pertahanan Mesir pada tahun 2012 dan berhasil menghentikan gelombang demonstran yang mengancam keamanan negara. Namun pada tahun 2013, al-Sisi melakukan kudeta militer dengan hasil tergulingnya Presiden Muhammad Mursi (Al-Jazeera, 2018).

Pada saat terjadinya pergantian rezim Muhammad Mursi oleh al-Sisi pada tahun 2013 melalui kudeta militer banyak terjadi kasus *enforced disappearance* di Mesir. Pemerintahan al-Sisi memerintah setelah terjadinya kudeta militer terhadap presiden sebelumnya Muhammad Mursi yang menjabat pada tahun 2012 dan dilakukannya pemilihan umum tahun 2014. Tercatat ada 1176 kasus *enforced disappearance* setelah kudeta Presiden Muhammad Mursi yaitu pada tahun 2013 sampai 2017 (United States Department of State, 2017). Sehingga dalam penelitian ini akan menjawab bagaimana pengaruh faktor kepemimpinan

Abdel Fattah al-Sisi dalam kasus *enforced disappearance* di Mesir dengan menggunakan pendekatan *Behavioral theory*. Menurut *Behavioral theory*, setiap perilaku pemimpin tidak datang begitu saja, namun ada hal yang mempengaruhi perilaku pemimpin. Menurut Ricard L. Huges, *Behavioral theory* menjelaskan tentang perilaku pemimpin berdasarkan kepribadian, pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, dan nilai (Richard L. Hughes, 2009: 262).

PEMBAHASAN

Kasus *enforced disappearance* yang terjadi pada era Presiden al-Sisi telah menelan banyak korban jiwa. Banyak masyarakat sipil yang menjadi korban dari peristiwa ini. Penghilangan paksa terjadi pada masa awal pemerintahan Presiden al-Sisi saat banyaknya gelombang protes oleh masyarakat. Korban *enforced disappearance* mayoritas berasal dari kaum pelajar. Pelajar di Mesir melakukan protes kepada pemerintah al-Sisi tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah sendiri untuk membatasi perbedaan pendapat politik dalam dunia pendidikan. Demonstrasi kebanyakan berasal dari *University of Cairo* dan *Al-Azhar University* sehingga penahanan terhadap mahasiswa pun kerap terjadi. Setidaknya lebih dari 40 mahasiswa ditahan setelah terjadinya demonstrasi yang berlangsung pada tahun 2014 lalu (Hashem, 2015).

Pada Juni 2015, kampanye *Freedom for Brave* melaporkan bahwa ada 163 kasus *enforced disappearance* pada bulan April dan Mei saja serta pada tahun 2017 terjadi penahanan 190 aktivis politik (Human Rights Watch, 2017). *Egyptian Commission for Rights and Freedoms* melaporkan pada bulan April tahun 2016 ada 544 kasus *enforced disappearance* selama periode delapan bulan antara Agustus 2015 sampai Maret 2016 sehingga ada sekitar dua atau tiga orang hilang setiap hari. *The Egyptian Co-ordination for Rights and Freedoms* melaporkan kepada *Amnesty International* bahwa antara bulan Januari sampai Mei 2016 telah terjadi 630 kasus dengan rata-rata tiga sampai empat orang mengalami penghilangan paksa (Amnesty International, 2016: 19-20).

Dalam kasus *enforced disappearance*, korban ditahan mulai dari empat hari hingga tujuh bulan. Selama penghilangan paksa, para korban ditahan di kantor polisi, kamp Pasukan Keamanan Pusat (CSF), sedangkan korban yang ditahan paling lama ditempatkan di NSA (*National Security Agency*). Hukum Mesir sebenarnya melarang menahan para tahanan ditempatkan dalam penahanan tidak resmi dimana lembaga peradilan tidak memiliki akses sehingga tidak dapat melakukan kunjungan inspeksi dan menyelidiki kasus-kasus penahanan sewenang-wenang yang dicurigai tanpa melalui perintah pengadilan. Hukum dan peraturan Mesir menganggap kantor polisi dan penjara menjadi tempat penahanan resmi yang bisa diakses oleh pengadilan. Namun, kamp Pasukan Keamanan Pusat (CSF) tidak dianggap sebagai tempat penahanan resmi, sampai pada tahun 2013 ketika mantan Menteri Dalam Negeri, Mohamed Ibrahim, mengeluarkan keputusan yang menunjuk kamp CSF sebagai salah satu tempat penahanan resmi (Amnesty International, 2016: 21).

Abdel Fattah al-Sisi atau al-Sisi lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 19 November 1954. Namun al-Sisi besar di Gamaleya dimana bersifat plural serta terdiri dari bermacam agama seperti Islam, Kristen, dan Yahudi (Al-Jazeera, 2018). Ayah dari al-Sisi bernama Hussein Khalili al-Sisi yang merupakan seorang pedagang dan pengrajin kotak kayu dengan hiasan mutiara. Ibunya bernama Soad Ibrahim Mohamed al-Shihi yang membantu suaminya berdagang. Orang tua al-Sisi memiliki toko di pasar Khan al-Khalili, tepatnya di Kairo. Toko keluarga al-Sisi merupakan salah satu toko besar di pasar itu serta sudah menghasilkan pendapatan yang besar. Dapat dikatakan al-Sisi sudah terlahir dari keluarga yang mapan secara ekonomi (Global Security, 2018).

Al-Sisi memiliki dua saudara laki-laki dan lima saudara perempuan. Keluarga al-Sisi juga merupakan keluarga yang religius karena ayah al-Sisi selalu menanamkan nilai agama kepada anak-anaknya saat masih kecil. Selain itu, ayah al-Sisi dinilai juga tegas dalam

mendidik anak-anaknya. Dia selalu menekankan tanggung jawab dan disiplin terutama kepada anak laki-laknya (Hackett, 2014). Setelah pulang sekolah, al-Sisi selalu menyempatkan waktu untuk menjaga toko keluarga. Hal ini dilakukan secara terus menerus dan merupakan ajaran dari ayah al-Sisi.

Pada masa kecil, al-Sisi dikenal juga dengan sosok yang pendiam dan agak tertutup dengan teman-temannya. Bahkan saat teman-teman seusianya bermain, al-Sisi justru sudah sering melakukan kegiatan fisik yang berat seperti mengangkat batu serta latihan fisik lainnya (Britannica, 2018). Pendidikan dasar al-Sisi dan saudaranya masih sama dengan yang lain yaitu bersekolah di sekolah negeri biasa di Gamaleya. Berbeda dengan saudaranya yang masuk sekolah negeri biasa, al-Sisi sudah mulai memasuki sekolah menengah yang dikelola oleh militer. Pendidikan militer al-Sisi berlanjut sampai masuk kepada akademi militer, sedangkan saudaranya melanjutkan pendidikan di universitas (Hackett, 2014).

Setelah itu al-Sisi melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus pada tahun 1977 (Smith, 2016: 17). Al-Sisi melanjutkan pelatihan militernya di Komando Layanan dan Staf Gabungan Inggris pada tahun 1992 dan menerima gelar master dari *US Army War College* di Pennsylvania pada tahun 2006. Setelah menjabat sebagai kepala keamanan di kantor atase militer di Arab Saudi, al-Sisi kembali ke Mesir pada tahun 2008 sebagai kepala staf dari zona militer utara (Sherif, 2017: 35). Al-Sisi juga pernah menjadi anggota paling muda dalam *Supreme Council of the Armed Forces* (SCAF) saat berlangsungnya revolusi Mesir pada tahun 2011 (BBC, 2014).

Pada tahun 2012, Presiden Mesir Mohamed Morsi mengangkat al-Sisi sebagai Kepala Angkatan Bersenjata Mesir menggantikan Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi. Setelah itu al-Sisi dipilih untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan Mesir. Pada tahun 2014 al-Sisi mulai resmi mundur dari dunia militer dan maju sebagai kandidat Presiden Mesir serta berhasil memenangkan pemilihan Presiden (Transparency International UK, 2018).

Presiden al-Sisi memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan fokus terhadap tujuan. Salah satu contoh dari kepemimpinan Presiden al-Sisi adalah dengan menerapkan kebijakan kontroversial untuk mencapai keamanan negara (Rezaei, 2015: 218). Beberapa kebijakan al-Sisi dalam hal hukum dan peraturan mengarah kepada sistem otoriter. Pertama yaitu dengan diubahnya peraturan tentang *protest law* atau hukum yang mengatur tentang kegiatan protes atau demonstrasi. Dalam *protest law* diatur bahwa aparat keamanan diberikan hak untuk melarang, membatalkan, menunda atau memindahkan demonstrasi apabila menimbulkan ancaman atau mengganggu zona aman serta bisa dilakukan dengan menggunakan cara paksaan. Selain itu, *protest law* melarang semua bentuk kegiatan yang mengganggu perdamaian dan keamanan termasuk melarang kegiatan unjuk rasa atau pemogokan yang mengganggu keamanan negara dengan diberlakukannya hukuman berupa sanksi penjara. Dampak dari aturan ini tentunya menghalangi kebebasan untuk berekspresi serta terjadinya kriminalisasi demonstrasi dengan justifikasi mengganggu keamanan negara (Hamzawy, 2017: 21-23).

Setelah itu, Mesir juga mengatur mengenai NGO (*Non Governmental Organization*). Dalam aturan yang baru diamanatkan tahun 2014 berisikan tentang pembatasan NGO dengan adanya kontrol dari pemerintah, pembatasan pendanaan serta adanya pengawasan dari badan intelijen untuk mengawasi kegiatan sipil. Aturan baru ini menetapkan bahwa NGO tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang berbenturan dengan keamanan nasional dan ketertiban umum. *Human Rights Watch* menjelaskan bahwa aturan tentang NGO akan menghalangi kegiatan survei dan penelitian lapangan serta mengganggu peran dari NGO itu sendiri (Egyptian Streets, 2017). Pada tahun 2016 lembaga legislatif Mesir menambahkan aturan baru yang bisa mengganggu kebebasan berserikat. Tidak terjadi pertentangan di dalam Parlemen sehingga semakin memudahkan aturan ini disetujui. Pemerintah juga memberikan wewenang kepada Kementerian Solidaritas Sosial untuk menolak pendaftaran tanpa adanya

persetujuan yudisial (Hamzawy, 2017: 24-26). Kondisi seperti ini membuat besarnya kontrol pemerintah terhadap NGO dan menghalangi kebebasan berserikat.

Rezim Pemerintahan al-Sisi mengeluarkan peraturan *Law of Organizing the Lists of Terrorist Entities and Terrorists* atau Hukum Terorisme pada tahun 2014. Undang-Undang ini memungkinkan pemerintah secara hukum untuk mengawasi dan menghukum orang-orang dan organisasi yang menentang kebijakan dan praktik resmi pemerintah. Dalam *article 1* dijelaskan definisi terorisme merupakan segala bentuk asosiasi, organisasi, kelompok, atau bentuk lainnya yang dimaksudkan membahayakan individu atau ketertiban umum, membahayakan perdamaian sosial dan keamanan nasional, menolak ketentuan konstitusi dan hukum yang berlaku, mencegah lembaga negara melaksanakan kegiatannya, atau mengancam kebebasan individu atau kebebasan umum yang diatur dalam konstitusi. Undang-Undang terorisme tidak mensyaratkan tuduhan terorisme oleh pemerintah dibuktikan melalui proses peradilan yang transparan sebelum seseorang masuk ke dalam daftar teroris. Melalui peraturan ini Pemerintah Mesir memiliki kewenangan untuk mengkategorikan suatu kelompok atau individu ke dalam kelompok teroris (Hamzawy, 2017: 27). Hal ini tentunya bisa dijadikan justifikasi terhadap tindakan pemerintah mengenai terorisme yang memiliki pengertian luas.

Pada tahun 2017, Presiden al-Sisi melakukan amandemen *Article 78* dengan menggunakan hak perogatifnya. Amandemen aturan baru menjelaskan bahwa pemerintah boleh melakukan kriminalisasi terhadap individu, kelompok, atau NGO yang mengganggu atau mengancam perdamaian nasional. Pemerintah juga melakukan hukuman berat kepada pihak-pihak yang mengganggu kondisi keamanan negara. Dalam *article 78* tidak menjelaskan secara jelas perbedaan antara kegiatan teroris dengan kegiatan lain yang mengganggu keamanan nasional. Peraturan ini bisa digunakan sebagai pembenaran untuk kegiatan yang menentang pemerintah. Segala kegiatan yang menentang pemerintah bisa dikategorikan sebagai bentuk tindakan yang mengganggu stabilitas domestik. Kondisi ini memungkinkan pemerintah melakukan tindak penahanan terhadap individu atau kelompok yang terlibat (Hamzawy, 2017: 16).

Sampai tahun 2016, lembaga Legislatif Mesir sudah melakukan ratifikasi *Protest Law*, dan Hukum Terorisme, serta melakukan amandemen Hukum NGO, dan Yurisdiksi Pengadilan Militer. Lembaga Legislatif Mesir telah menyetujui tanpa revisi atau diskusi 342 Keputusan Presiden dari 343 usulan peraturan. Penyetujuan ini berlangsung dalam waktu yang singkat, yaitu tidak lebih dari lima belas hari dalam satu peraturan. Hal ini melanggar konstitusi karena dalam peraturan mengenai usulan Lembaga Eksekutif harus melalui pertimbangan sebelum ratifikasi Keputusan Presiden (Freedom House, 2018). Satu-satunya Undang-Undang yang ditolak oleh Badan legislatif adalah Keputusan Presiden 2015 tentang layanan sipil. Bahkan dalam kasus ini, peraturan itu akhirnya diloloskan oleh Parlemen dengan sedikit perubahan. Gerakan ini menunjukkan bahwa Lembaga Legislatif setia kepada Lembaga Eksekutif. Loyalitas dibentuk oleh militer dan layanan keamanan serta intelijen dalam mengelola pemilihan parlemen pada tahun 2015 (Hamzawy, 2017: 17).

Cara yang dilakukan oleh Presiden al-Sisi merupakan suatu kontrol pemimpin terhadap situasi yang tengah dihadapi. Presiden al-Sisi memiliki kontrol besar dalam sebuah kelompok dan keputusan diambil oleh pemimpin tanpa adanya diskusi atau melibatkan pihak lain karena tidak adanya ketidakpercayaan. Kepemimpinan al-Sisi juga menuntut adanya kepatuhan, dan apabila tidak dipatuhi maka akan ada sanksi yang diterapkan untuk menciptakan suatu kepatuhan. Ancaman hukuman bisa dijadikan sebagai alat kontrol terhadap lingkungan. Kebijakan Presiden al-Sisi diterapkan dalam situasi mendesak dan memiliki sedikit waktu dalam pengambilan keputusan. Maka sesuai dengan model kepemimpinan menurut Skydell, maka Presiden al-Sisi cenderung memiliki gaya

kepemimpinan otoriter atau *authoritarian*. Dengan adanya kasus *enforced disappearance* ini juga menjadi salah satu contoh dari gaya kepemimpinan yang bersifat satu arah atau otoriter.

Menurut *Behavioral theory*, setiap perilaku pemimpin tidak datang begitu saja, namun ada hal yang mempengaruhi perilaku pemimpin. Menurut Ricard L Huges, *Behavioral theory* menjelaskan tentang perilaku pemimpin berdasarkan nilai, kepribadian, pengalaman, kecerdasan, dan pengetahuan (Richard L. Hughes, 2009: 262).

Presiden al-Sisi dinilai memiliki kepribadian yang tertutup sehingga kehidupan keluarga dan pribadi presiden Mesir ini jarang diberitakan oleh media. Hal seperti ini tentunya tidak mengherankan saat melihat kehidupan al-Sisi sebelumnya. Tetangga dan teman-teman al-Sisi menggambarkan al-Sisi sebagai sosok yang disiplin, taat, sedikit tertutup, dan kadang membosankan (The Guardian, 2014). Sosok yang taat aturan dan disiplin membuat al-Sisi lebih tertarik kepada dunia militer. Karir militer al-Sisi juga bisa terbilang bagus karena telah berhasil mendapatkan berbagai posisi penting militer setelah pendidikan. Kondisi seperti ini membuat kepribadian taat dan disiplin al-Sisi semakin kuat sehingga dalam kepemimpinannya, al-Sisi sering bertindak tegas terhadap permasalahan yang ada termasuk permasalahan keamanan dalam negeri.

Presiden al-Sisi memiliki pengalaman yang sangat banyak saat berada dalam dunia militer. Al-Sisi sudah mulai memasuki sekolah menengah yang dikelola oleh militer saat saudaranya yang lain bersekolah di sekolah biasa. Setelah itu al-Sisi melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus pada tahun 1977 (Smith, 2016: 17). Al-Sisi melanjutkan pelatihan militernya di Komando Layanan dan Staf Gabungan Inggris pada tahun 1992 dan menerima gelar master dari *US Army War College* di Pennsylvania pada tahun 2006. Setelah menjabat sebagai kepala keamanan di kantor atase militer di Arab Saudi, al-Sisi kembali ke Mesir pada tahun 2008 sebagai kepala staf dari zona militer utara (Sherif, 2017: 35). Al-Sisi juga pernah menjadi anggota paling muda dalam *Supreme Council of the Armed Forces* (SCAF) saat berlangsungnya revolusi Mesir pada tahun 2011 (BBC, 2014).

Pengetahuan yang dimiliki oleh Presiden al-Sisi kebanyakan didapatkan dari sekolah militer yang sering dijalani. Seperti yang diketahui bahwa al-Sisi sudah memasuki sekolah menengah yang dikelola oleh militer. Setelah itu al-Sisi melanjutkan sekolah ke Akademi Militer Mesir. Perjalanan karier al-Sisi dalam dunia militer sangat cemerlang saat ditugaskan di berbagai posisi penting militer. Dalam militer, penanganan yang cepat sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi bahaya (Brandebo, 2015: 20). Dalam kasus ini, keamanan negara merupakan suatu ancaman dan bahaya sehingga harus ditangani dengan cepat. Pengetahuan mengenai cara menyelesaikan masalah banyak didapatkan saat dalam militer. Seperti yang diketahui bahwa keputusan militer bersifat *top-down* atau satu arah sehingga hal ini juga bisa diterapkan saat menjabat sebagai presiden (Brandebo, 2015: 23).

Presiden al-Sisi diketahui memiliki kecerdasan yang bagus terutama dalam kecerdasan bidang militer. Tidak diragukan lagi bahwa al-Sisi merupakan sosok cerdas dalam dunia militer Mesir. Hal ini dibuktikan melalui lulus dari pendidikan akademi militer dengan rentan waktu yang cukup cepat. Setelah itu al-Sisi juga pernah melanjutkan pendidikan di Inggris serta mendapatkan gelar dari pendidikan militer di Amerika Serikat pada tahun 2006. Al-Sisi juga pernah diangkat menjadi kepala intelijen dan pengintaian Mesir. Selain itu al-Sisi juga tercatat telah menjadi *Commander, Chief of Staff*, atau *Deputy Director* sebanyak delapan kali dari berbagai divisi dalam struktur militer di Mesir. Presiden Mesir sebelumnya, yaitu Mohammad Morsi mengangkat al-Sisi menjadi Menteri Pertahanan untuk mengatasi kondisi krisis (CNN, 2018). Bahkan al-Sisi berhasil menyelamatkan Negara Mesir dari target kejahatan transnasional terorisme yang terafiliasi dengan *Muslim Brotherhood* pada saat menjadi Menteri Pertahanan maupun saat menjabat sebagai Presiden Mesir (Egypt Today, 2017).

Presiden al-Sisi memiliki nilai yang dianggap benar serta akan berpengaruh dalam tindakan dan kebijakan al-Sisi kedepannya. Al-Sisi memiliki nilai untuk menjaga keamanan kondisi Mesir bagaimana pun caranya. Presiden al-Sisi sendiri meyakini bahwa Mesir merupakan tulang belakang negara-negara Arab atau Timur Tengah, jadi apabila kondisi Mesir tidak stabil maka kondisi Timur Tengah juga akan tidak stabil bahkan tatanan sistem bisa runtuh (Egypt Independent, 2018). Selain itu al-Sisi juga menilai bahwa nilai-nilai HAM versi barat tidak dapat diterapkan di semua negara termasuk Mesir. Perspektif Barat tidak dapat digunakan dalam melihat kondisi domestik dan regional Mesir. Ada berbagai faktor yang dapat membedakan penerapan HAM di berbagai negara sehingga tidak dapat dipaksakan satu perspektif Barat dalam melihat penerapan HAM. Presiden al-Sisi tidak mengikuti perspektif HAM Barat sehingga sering terdapat pertentangan dari media asing (Al Arabiya English, 2016).

Beberapa faktor diatas tentunya juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi politik. Kepemimpinan erat kaitannya dengan politik karena saling berhubungan dengan kekuasaan. Sosialisasi politik akan membentuk bagaimana pandangan Presiden al-Sisi dalam menanggapi situasi atau fenomena sosial tertentu. Sosialisasi politik juga mempengaruhi akan faktor kepemimpinan yang dijelaskan sebelumnya sehingga dapat dilihat bagaimana proses kepemimpinan Presiden al-Sisi terbentuk.

Abdel Fattah Al-Sisi terlahir dari keluarga dengan latar belakang pedagang atau dalam bahasa Mesir biasa disebut *Bazaar*. Ayahnya bernama Said Hussein Khalili al-Sisi yang merupakan seorang pedagang serta ibunya bernama Soad Ibrahim Mohamed al-Shihi yang membantu suaminya sebagai seorang pedagang di Kota Mesir. Keluarga al-Sisi tidak memiliki unsur latar belakang politik sehingga dalam keluarga sendiri tidak mengajarkan pendidikan politik secara langsung. Dalam pendidikan keluarga al-Sisi mengajarkan tentang tanggung jawab dan disiplin yang berlangsung saat al-Sisi masih kecil. Bahkan al-Sisi membantu menjaga toko keluarga setelah pulang dari sekolah. Hal ini melambangkan sebuah tanggung jawab dan kedisiplinan. Dalam setiap tugasnya al-Sisi selalu menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu agar tugas lainnya bisa dikerjakan setelahnya (The Guardian, 2014). Keluarga al-Sisi secara ekonomi bisa dibilang sangat mencukupi dan merupakan salah satu keluarga kaya di area tempat tinggalnya, namun keluarga al-Sisi tetap memberikan nilai-nilai tanggung jawab dan kedisiplinan agar berguna saat kehidupan nantinya (CNN, 2018).

Agen kedua yang berpengaruh dalam sosialisasi politik adalah sekolah. Selain keluarga, sekolah juga menjadi agen sosialisasi politik yang paling berpengaruh. Seperti yang diketahui bahwa Presiden al-Sisi merupakan sosok dengan latar belakang militer yang kuat. Ini diawali dari saat al-Sisi telah memilih bersekolah di sekolah menengah yang dikelola oleh militer (The Guardian, 2014). Setelah itu al-Sisi melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus pada tahun 1977 (Smith, 2016: 17). Al-Sisi melanjutkan pendidikan militer Mesir di *General Command and Staff Course, Egyptian Command and Staff College* pada tahun 1987. Setelah itu, al-Sisi juga melanjutkan pendidikan militer di *General Command and Staff Course, Joint Command and Staff College*, tepatnya di Inggris pada tahun 1992 sebelum kembali lagi ke Mesir untuk mengikuti *War Course, Fellowship of the Higher War College, Nasser Military Academy* pada tahun 2003. Al-Sisi bahkan menerima gelar master di *United States Army War College, Pennsylvania* Amerika Serikat pada tahun 2006. Selain pendidikan formal, al-Sisi juga sering mengikuti berbagai kursus dalam pendidikan militer, diantaranya yaitu *Egyptian Armed Forces military attaché* di Riyadh, Saudi Arabia dan *Basic Infantry Course* yang bertempat di Amerika Serikat (Al-Jazeera, 2018).

Pendidikan militer yang dimiliki oleh al-Sisi sangat mempengaruhi faktor kepemimpinan al-Sisi yang berkaitan dengan politik. Keputusan dalam pendidikan militer bisa bersifat otoriter karena lebih berfokus kepada pengaruh komandan atau pemimpin. Sistem yang ada dalam dunia militer juga bersifat hirarkis artinya ada tingkatan dalam

jabatan militer. Peran pemimpin dalam militer sangat besar karena pemimpin memahami situasi yang lebih baik daripada bawahan (Mattila, 2012: 9). Dalam militer juga dituntut mengambil keputusan yang cepat dalam situasi darurat. Cara-cara yang diambil juga bisa bersifat memaksa karena mengutamakan kepentingan negara (Brandebø, 2015). Menjaga keamanan dan kestabilan negara menjadi prioritas dalam pendidikan militer sehingga pembelajaran ini menjadi referensi al-Sisi saat menjabat sebagai Presiden Mesir.

Agen ketiga yang mempengaruhi proses sosialisasi politik adalah media massa. Media juga merupakan sumber informasi yang kaya tentang pemerintahan, politik, dan kejadian kontemporer. Setelah banyaknya pelanggaran yang terjadi pada masa Pemerintahan Presiden al-Sisi, media internasional mulai menyoroti kondisi Mesir. Banyak berbagai media yang memberikan kritik terhadap kepemimpinan al-Sisi. Mulai tahun 2014 saja sudah banyak pemberitaan yang lebih sering menyoroti kondisi Mesir yang penuh dengan kekacauan. Pemberitaan ini dimulai dari media barat dan Amerika Serikat dan akhirnya menyebar ke berbagai media masa lain termasuk media lokal Mesir dengan sangat cepat. Berita ini pun mendapatkan respon dari dunia internasional. Banyak negara dan organisasi internasional yang meminta Mesir untuk memperbaiki kondisi domestik (Hellyer, 2016).

Kondisi ini tentunya direspon oleh al-Sisi selaku Presiden Mesir yang sering disoroti oleh media internasional. Al-Sisi bahkan pernah mengatakan bahwa media internasional hanya menyoroti kondisi buruk Mesir saja tanpa memandang aspek lain. Presiden al-Sisi akhirnya melakukan penutupan media lokal Mesir yang sering menyoroti kondisi negatif pemerintahan Mesir. Berbagai media internasional juga dilarang dalam melakukan liputan atau pencarian data di Mesir (Hamzawy, 2017). Dari situasi ini dapat dilihat bahwa media mempengaruhi sosialisasi politik yang menjurus kepada faktor kepemimpinan. Presiden al-Sisi semakin menerapkan sistem kepemimpinan otoriter karena pemberitaan media internasional maupun domestik melalui dengan penutupan media lokal serta larangan penelitian bagi media asing.

KESIMPULAN

Kasus *enforced disappearance* yang terjadi di Mesir dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan politik Presiden al-Sisi. Presiden al-Sisi sendiri memiliki model kepemimpinan otoriter atau authoritarian yang ditandai dengan kebijakan yang bersifat koersif demi kepentingan negara. Berbagai peraturan telah dibuat pada masa pemerintahan Presiden al-Sisi yang membatasi hak individu serta juga menerapkan cara paksaan dalam kebijakannya. Kebijakan ini menjadi instrumen untuk mengontrol kondisi domestik negara agar tetap kondusif. Fakta ini menjelaskan bahwa Presiden al-Sisi termasuk ke dalam model kepemimpinan otoriter.

Model kepemimpinan otoriter Presiden al-Sisi tidak datang begitu saja. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepemimpinan otoriter Presiden al-Sisi. Kelima faktor tersebut adalah kepribadian, pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, dan nilai. Faktor ini saling berkaitan dengan sosialisasi politik yang didapatkan oleh Presiden al-Sisi. Dalam proses tersebut terdapat agen yang mempengaruhi proses sosialisasi politik Presiden al-Sisi yaitu dimulai dari keluarga, sekolah atau pendidikan, dan yang terakhir yaitu media. Proses ini menjelaskan pengaruh terbentuknya kepemimpinan politik Presiden al-Sisi.

Untuk menjelaskan determinasi terbentuknya kepemimpinan politik Presiden al-Sisi bisa menggunakan Model determinasi pembelajaran politik. Determinasi kepemimpinan politik Presiden al-Sisi tergolong ke dalam recency model karena periode usia yang paling berpengaruh berada pada usia dewasa. Proses pembelajaran politik al-Sisi sudah berlangsung saat usia anak-anak dan terus berlangsung sampai periode usia dewasa. Determinasi yang membentuk kepemimpinan otoriter Presiden al-Sisi berada pada periode dewasa saat terlibat langsung dalam posisi politis dengan menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Presiden

Mesir. Pada periode ini, Presiden al-Sisi menerapkan kebijakan yang mengarah kepada model kepemimpinan otoriter.

REFERENSI

- Al-Jazeera. (2018). *Profile: Abdel Fattah el-Sisi*. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/middleeast>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.
- Al-Jazeera. (2016). *Egypt's Pharaoh Illusion*. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/05/egypt-pharaoh-illusion-160510072851346.html>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2018,
- Amnesty International. (2016). *Egypt: Officially, You Do Not Exist, Disappearance and Tortured in The Name of Counter-Terrorism*. Tersedia di: https://www.amnestyusa.org/files/embargoed_13_july__egypt_officially_you_do_not_exist.pdf. Diakses pada tanggal 20 Februari 2018.
- BBC. (2014). *Egypt: Abdul Fattah al-Sisi profile*. Tersedia di: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-19256730>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.
- Brandebo, M. F. (2015). *Military Leaders and Trust. Karlstad University Studies* .
- Britannica. (2018). *Abdel Fatah al-Sisi: President of Egypt*. Tersedia di: <https://www.britannica.com/biography/Abdel-Fattah-al-Sisi>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018
- Britannica. (2018). *Abdel Fatah al-Sisi: President of Egypt*. Tersedia di: <https://www.britannica.com/biography/Abdel-Fattah-al-Sisi>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.
- CNN. (2018). *Abdel Fattah el-Sisi Fast Facts*. Tersedia di: <https://edition.cnn.com/2014/07/01/world/africa/abdel-fattah-el-sisi-fast-facts/index.html>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.
- Egyptian Streets. (2017, May 29). *Egypt's President Al-Sisi Issues Controversial NGO Law*. Tersedia di: <https://egyptianstreets.com/2017/05/29/egypts-president-al-sisi-issues-controversial-ngo-law/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.
- Freedom House. (2018). *Freedom in The World 2018*. Tersedia di: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/egypt>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.
- Global Security. (2018). *Abdel-Fattah El-Sisi / Abdel-Fattah al-Sisi*. Tersedia di: <https://www.globalsecurity.org/military/world/egypt/el-sisi.htm>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2018.
- Hamzawy, A. (2017). *Legislating Authoritarianism Egypt's New Era of Repression. Carnige Endowment for International Peace* .
- Hashem, M. (2015). *Egypt's human rights groups decry Enforced disappearances*. Tersedia di : Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2015/06/egypt-human-rights-groups-decry-forced-disappearances-150617091242563.html>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2018.
- Hellyer, H. (2016). *Why Egypt's media has turned on President Sisi*. Tersedia di: <https://www.vox.com/2016/5/11/11657060/egypt-journalists-sisi>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.
- Hackett, K. (2014). *Newsmaker: Abdel Fatah El Sisi*. Tersedia di: <https://www.thenational.ae/lifestyle/newsmaker-abdel-fatah-el-sisi-1.250756>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2018.
- Mattila, J. (2012). *Military Knowledge Management: Sense Making Decision Making and Knowledge Creation. Aalto University* .

- Rezaei, M. (2015). Egypt and "Democracy Dilemma". *African Journal of Political Science and International Relations* .
- Richard L. Hughes, R. C. (2009). *Leadership: Enhancing the Lessons of Experience*. New York: The McGraw-Hill.
- Sherif, A. E. (2017, Juni). A Dangerous Deterioration: Egypt Under al-Sisi. *Project on Middle East Democracy* .
- Smith, B. (2016). Egypt under Sisi. *House of Commons Library* .
- The Guardian. (2014). *Abdel Fatah al-Sisi: behind the public face of Egypt's soon-to-be president*. Tersedia di: <https://www.theguardian.com/>. Diakses pada tanggal 5 September 2018.
- The Guardian. (2017). *Egypt's security forces are enforcing 'torture assembly line'*. Tersedia di: <https://www.theguardian.com/global-development>. Diakses pada tanggal 4 September 2018.
- Transparency International UK. (2018). *The Officers' Republic The Egyptian Military and Abuse of Power*. Tersedia di: http://ti-defence.org/wp-content/uploads/2018/03/The_Officers_Republic_TIDS_March18.pdf. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.